



***Collaborative Governance* dalam Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Tertoleran Tahun 2023**

Meiga Dwi Prihatiningsih^{*}, Nandang Alamsah Deliarnoor, Rina Hermawati

Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Indonesia

^{*}meigadwi1505@gmail.com

Abstract

Tolerance is one of the essential pillars in creating a harmonious and inclusive society, particularly in a city with ethnic and cultural diversity like Singkawang. Collaborative Governance, as an approach involving various stakeholders in the decision-making process, is key to achieving this goal. This study aims to explore how Collaborative Governance plays a role in making Singkawang a Tolerant City in 2023, using Ansell and Gash's (2007) theory of Collaborative Governance as an analytical framework. The research method used is a qualitative study with a descriptive approach. Data was collected through in-depth interviews and related document analysis. The results show that there are 13 main stakeholders involved, with the Singkawang City Government as the primary facilitator. Each has a specific role in facilitating cooperation, conducting dialogues, preserving culture, and supporting activities that promote tolerance. The study also found that the roles and contributions among stakeholders have not yet been fully integrated into a structured legal framework, and there are still challenges in aligning interests and long-term commitments. Collaborative Governance in Singkawang is effective in enabling better coordination among stakeholders, but there are still shortcomings in dialogue participation, consensus on mutual understanding, and accountability mechanisms that need improvement. This study provides important insights for the development of public policy and collaborative practices in Singkawang.

Keywords: *Collaborative Governance; Government Role; Tolerance; Singkawang the Most City of Tolerant.*

Abstrak

Toleransi merupakan salah satu pilar penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan inklusif, khususnya di kota dengan keberagaman etnis dan budaya seperti Singkawang. Collaborative Governance, sebagai pendekatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, menjadi kunci dalam mewujudkan tujuan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Collaborative Governance berperan dalam menjadikan Singkawang sebagai Kota Tertoleran tahun 2023, menggunakan teori Ansell dan Gash (2007) tentang *Collaborative Governance* sebagai kerangka analisis. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 13 pemangku kepentingan utama yang terlibat, dengan Pemerintah Kota Singkawang sebagai Fasilitator utamanya. Masing-masing memiliki peran spesifik dalam memfasilitasi kerjasama, mengadakan dialog, melestarikan budaya, dan mendukung kegiatan yang mempromosikan toleransi. Penelitian ini juga menemukan bahwa peran dan kontribusi antar stakeholder belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka hukum yang terstruktur, serta masih terdapat tantangan dalam menyelaraskan kepentingan dan komitmen jangka panjang. *Collaborative Governance* di Singkawang efektif dalam

memungkinkan koordinasi yang lebih baik di antara *stakeholder*, tetapi masih ada kekurangan dalam aspek partisipasi dialog, konsensus terhadap pemahaman bersama dan mekanisme akuntabilitas yang perlu diperbaiki. Studi ini memberikan wawasan penting bagi pengembangan kebijakan publik dan praktik kolaboratif di Singkawang. Studi ini memberikan wawasan penting bagi pengembangan kebijakan publik dan praktik kolaboratif dalam konteks sosial dan multikultural di Singkawang.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*; Peran Pemerintah; Toleransi; Singkawang Kota tertoleran.

Pendahuluan

Toleransi merupakan salah satu kunci utama dalam menciptakan masyarakat inklusif, tanpa toleransi, risiko konflik dan ketidaksetaraan meningkat, mengganggu proses politik dan kebijakan Pembangunan (Gibson, 1992). Dalam era keberagaman budaya, agama, dan pandangan hidup, kemampuan menerima perbedaan adalah fondasi masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan. Toleransi bukan hanya sikap pasif, tetapi usaha aktif untuk memahami, menghargai, dan merangkul perbedaan (Akoleowo, 2021; McKinnon, 2007; Smith, 2011). Artinya toleransi menolak diskriminasi dan prasangka, serta mendorong kesetaraan dan keadilan, yang penting dalam masyarakat demokratis. Di Indonesia, nilai-nilai toleransi terkandung dalam ideologi negara, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta dilindungi dalam Undang Undang Dasar 1945. Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 29 ayat (2) menjamin kebebasan berpendapat dan beragama. Ini menunjukkan pentingnya toleransi untuk menciptakan kehidupan berbangsa yang inklusif dan menjunjung hak asasi manusia. Namun, praktik intoleransi masih sering terjadi (Khansa, 2023). Diskriminasi agama, suku, rasial, etnis, serta kekerasan terhadap kelompok minoritas menunjukkan tantangan dalam mengimplementasikan toleransi. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu meningkatkan pendidikan toleransi, penegakan hukum, dan mendukung dialog antarbudaya untuk mengatasi tantangan ini (Suharto, 2019).

Kolaborasi adalah kunci utama untuk menciptakan kehidupan yang toleran dan plural dalam masyarakat Aceh, Murtini & Santoso (2023) dan memiliki hubungan erat dalam membangun masyarakat inklusif dan harmonis. Toleransi menciptakan lingkungan di mana individu dan kelompok merasa diterima dan dihargai meskipun ada perbedaan. Penelitian menunjukkan bahwa toleransi tinggi memfasilitasi kolaborasi efektif dengan mengurangi hambatan seperti prasangka, konflik, dan ketidakpercayaan antar kelompok (Pettigrew & Tropp, 2008). Ketika individu merasa diterima dan dihargai, mereka lebih mungkin berpartisipasi dalam kolaborasi lintas kelompok, yang memperkuat hubungan antar kelompok, meningkatkan pemahaman bersama, dan mempromosikan toleransi lebih luas di masyarakat (Putnam, 2000). Namun, perbedaan pandangan, nilai, dan budaya sering menjadi hambatan utama dalam kolaborasi yang efektif. Ketidakmampuan untuk mendengarkan dengan empati dan memahami perspektif orang lain juga dapat menghalangi proses kolaborasi (Allport, Clark & Pettigrew, 1954). Ketidakpercayaan dan ketakutan terhadap kelompok lain, didorong oleh stereotip atau pengalaman masa lalu, bisa mempengaruhi kemauan untuk bekerja sama (Hewstone, Rubin & Willis, 2002).

Untuk mencapai kolaborasi yang sukses dalam mempromosikan toleransi, penting untuk mengatasi hambatan-hambatan ini melalui komunikasi terbuka, pembangunan hubungan saling percaya, dan pengakuan akan pentingnya kerja sama lintas kelompok. Di tingkat daerah, toleransi memungkinkan kerjasama lintas kelompok yang efektif. Kolaborasi antar individu dan kelompok beragam memperkuat rasa saling menghargai dan kebersamaan, memperdalam pemahaman lintas budaya, dan memperkuat kohesi

sosial (Pettigrew & Tropp, 2008). Kolaborasi lintas kelompok juga dapat memobilisasi sumber daya untuk menangani masalah sosial, ekonomi, atau lingkungan yang kompleks (Stürmer & Simon, 2004). Kota Singkawang di Kalimantan Barat merupakan contoh praktik baik dalam menjaga nilai-nilai toleransi melalui upaya kolaborasi. Kota ini dibentuk berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135/ 2094/ SJ Tahun 2001. Berdasarkan laporan Indeks Kota Toleran dari Setara Institute (2023), Singkawang menempati posisi teratas sebagai Kota Tertoleran di Indonesia selama tiga tahun berturut-turut (2021-2023) dari 94 kota yang diukur (Amaranggana & Afifah, 2024). Penilaian ini didasarkan pada lima atribut utama visi pembangunan inklusif, regulasi kondusif, pernyataan dan tindakan pemerintah yang mendukung toleransi, tingkat intoleransi yang rendah, dan upaya berkesinambungan dalam mengelola keberagaman.

Meski dinobatkan sebagai Kota Tertoleran secara berturut-turut, toleransi di Kota Singkawang tetap memiliki potensi untuk terpecah kembali. Salah satu alasannya adalah karena Singkawang juga memiliki sejarah kelam intoleransi di daerah sekitarnya, seperti Peristiwa Mangkuk Merah di Sebagian besar wilayah Kalimantan Barat tahun 1967, konflik di Kabupaten Sambas tahun 1999. Di wilayah Kota Singkawang sendiri juga pernah terjadi kejadian intoleransi, seperti demonstrasi penolakan terhadap pembangunan Tugu Naga Singkawang yang terletak di persimpangan Jalan Kempol Mahmud Jalan Niaga oleh Front Pembela Islam Kota Singkawang dan Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ada Tahun 2008 (Kompas, 2010). Di Tahun 2022 beredar video diduga isu SARA oleh salah satu Guru SD Negeri yang mendenda anak muridnya jika menyaksikan pertunjukkan Cap Go Meh yang merupakan ritual adat warga Tionghoa di Kota Singkawang (Cipta & Arief, 2020). Yang baru-baru terjadi di Tahun 2022 ini, terjadi propaganda pembangunan Tugu Tuak yang melambangkan etnis tertentu dan polemik pembangunan Tugu Istighfar di tengah Kota Singkawang yang sempat terhenti akibat perdebatan isu SARA. Beberapa kejadian tersebut menunjukkan meskipun Kota Singkawang terkenal dengan tingkat toleransinya yang tinggi, namun beberapa tantangan masih menghambat upaya kolaboratif dalam mencapai toleransi yang lebih inklusif. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak yang harus diperbaiki dan dipersiapkan agar Kota Singkawang tetap terjaga toleransinya.

Beberapa penelitian terdahulu mengkaji toleransi pernah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan fokus penelitian yang cukup beragam. Misalnya, Chumairah & Al-Hamdi (2019) yang meneliti dinamika toleransi di Kota Besar Indonesia, khususnya peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan City of Tolerance. Hermawati, Paskarina & Runiawati (2016) memfokuskan pada toleransi antar umat beragama di Kota Bandung, dengan mengukur seberapa jauh para pemeluk agama menentukan jarak sosial mereka terhadap yang lain. Nuryani & Taufiq (2019) menyoroti peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam memelihara toleransi beragama di Kota Salatiga. Makalew, Sambiran dan Waworundeng (2021) memfokuskan pada koordinasi antara pemerintah dan FKUB dalam menciptakan kerukunan umat beragama di Kota Manado. Sementara itu, penelitian Jufanda (2021) meneliti kebijakan pemerintah dalam meningkatkan toleransi keberagamaan di Kabupaten Aceh Singkil. Namun, penelitian-penelitian tersebut hanya menekankan pada bagaimana peranan satu aktor saja dalam menangani isu toleransi tanpa melihat proses kolaborasi yang terjadi secara menyeluruh dan komprehensif. Sepanjang penelusuran penulis belum ditemukan satupun diantaranya yang secara khusus membahas bagaimana proses *Collaborative Governance* dalam mewujudkan lingkungan toleran seperti yang akan dibahas dalam penelitian ini, sehingga hal ini dapat disebut sebagai unsur *novelty* (kebaruan). *Collaborative Governance* dalam konteks toleransi jarang dibahas atau diteliti karena kompleksitas yang terlibat dalam

mengkoordinasikan berbagai aktor dengan kepentingan, tujuan, dan sumber daya yang berbeda. Proses ini membutuhkan interaksi yang mendalam antara pemerintah, masyarakat, organisasi keagamaan, dan sektor swasta, yang tidak hanya sulit diukur, tetapi juga menuntut komitmen tinggi dari semua pihak untuk mencapai hasil yang efektif. Kompleksitas dan tantangan tersebut ternyata mampu diatasi oleh Kota Singkawang hingga dinobatkan sebagai Kota Tertoleran Tahun 2023.

Berangkat dari pemikiran tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi peran *Collaborative Governance* dalam mewujudkan Singkawang sebagai Kota Tertoleran tahun 2023. Penelitian ini mengidentifikasi dua rumusan masalah utama, yaitu siapa saja stakeholder yang terlibat dalam upaya ini serta peran dan kontribusi masing-masing stakeholder dalam mencapai tujuan tersebut. Kedua bagaimana proses kolaborasi itu terjadi apabila diteliti dalam kerangka kerja dari (Ansell & Gash, 2007). Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi para perumus kebijakan dalam memformulasikan upaya-upaya tindak lanjut terhadap kelemahan ataupun keunggulan yang dimiliki Kota Singkawang, sehingga dapat menjadi kontribusi signifikan untuk pemahaman praktis dan teoretis tentang bagaimana *Collaborative Governance* dapat membentuk dan memelihara toleransi di konteks lokal hingga menjadi *best practice* bagi daerah lain.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, sesuai dengan deskripsi desain penelitian yang telah diuraikan sebelumnya. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami, mendeskripsikan, dan menganalisis proses *Collaborative Governance* dalam mewujudkan Kota Singkawang sebagai Kota Tertoleran Tahun 2023. Melalui studi bahan bacaan dan informasi yang diperoleh melalui media cetak dan elektronik mengenai proses *Collaborative Governance* dalam mewujudkan Kota Singkawang sebagai Kota Tertoleran Tahun 2023, data sekunder ini memberikan kontribusi yang penting untuk pemahaman dalam pelajaran ini.

Penelitian ini akan mengadopsi wawancara dan observasi sebagai metode pengumpulan data untuk memastikan kualitas dan keakuratan informasi yang diperlukan. Pedoman wawancara yang dilakukan adalah pedoman wawancara tidak terstruktur, tujuannya adalah untuk menyelidiki isu-isu utama yang diangkat dalam pertanyaan pedoman wawancara dengan cara yang lebih mendalam dan komprehensif. Dalam penelitian kualitatif, pemilihan informan merupakan langkah penting untuk mendapatkan data yang kaya dan akurat. Dalam memilih informan digunakan adalah metode *purposive sampling*.

Tabel 1. Informan Penelitian

| No. | Informan | Jenis Lembaga | Jumlah (Orang) |
|-----|--|---------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Wali Kota Singkawang | Pemerintahan | 1 |
| 2. | Ketua DPRD Kota Singkawang | Pemerintahan | 1 |
| 3. | Sekretaris Daerah Kota Singkawang | Pemerintahan | 1 |
| 4. | Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Singkawang | Pemerintahan | 1 |
| 5. | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang | Pemerintahan | 1 |
| 6. | Kepala Bagian Kesra Setda Kota Singkawang | Pemerintahan | 1 |

| | | | |
|-----|--|------------------|----|
| 7. | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang | Pemerintahan | 1 |
| 8. | Forum kerukunan Umat Beragama | Non Pemerintahan | 5 |
| 9. | Ketua Paguyuban se-Kota Singkawang (Majelis Seni Budaya Kota Singkawang) | Non Pemerintahan | 4 |
| 10. | Ketua Forum Komunikasi Pemuda Lintas Agama (FKPELA) | Non Pemerintahan | 5 |
| 11. | Wakil Kepala Kepolisian Resor Singkawang | Pemerintahan | 1 |
| 12. | Komandan Distrik Militer 1202/SKW | Pemerintahan | 1 |
| 13. | Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang | Pemerintahan | 1 |
| 14. | Perwakilan Penggiat Seni, Budaya, Pemengaruh dan Industri Kreatif di Kota Singkawang | Non Pemerintahan | 3 |
| 15. | Perwakilan Pihak Swasta di Kota Singkawang | Non Pemerintahan | 3 |
| 16. | Perwakilan Media di Kota Singkawang | Non Pemerintahan | 3 |
| 17. | Perwakilan Perguruan Tinggi di Kota Singkawang | Non Pemerintahan | 3 |
| 18. | Perwakilan Masyarakat Sipil di Kota Singkawang | Non Pemerintahan | 10 |
| | Total | | 46 |

(Sumber: diolah oleh penulis Tahun 2024)

Peneliti memilih informan diatas dengan kriteria dan pertimbangan bahwa orang-orang dalam daftar tabel 1 di atas adalah informan yang terlibat langsung sebagai stakeholder terkait dalam mewujudkan Toleransi di Kota Singkawang, Informan-informan tersebut dianggap mampu serta dapat menguasai permasalahan yang ada mengenai fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sehingga dapat memberikan data dan fakta yang akurat serta relevan.

Hasil dan Pembahasan

1. Stakeholder Yang Terlibat Dalam Mewujudkan Kota Tertoleran Tahun 2023 serta Peran, Kontribusi dan Kolaborasi yang dilakukan

Terwujudnya Kota Singkawang sebagai Kota Tertoleran Tahun 2023 melibatkan berbagai pihak yang berperan aktif dalam menjaga dan mempromosikan nilai-nilai toleransi di masyarakat. Setiap stakeholder memiliki peran penting dan kontribusi yang berbeda-beda dalam mendukung tercapainya tujuan ini. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat sipil, dan sektor swasta menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan inklusif di Singkawang. Berikut adalah penjabaran mengenai peran dan kontribusi masing-masing stakeholder dalam upaya mewujudkan Kota Singkawang sebagai Kota Tertoleran Tahun 2023.

a. Pemerintah Kota Singkawang

Pemerintah Kota Singkawang memainkan peran sentral dalam mewujudkan kota tersebut sebagai Kota Tertoleran Tahun 2023 melalui berbagai kebijakan strategis dan program-program yang dirancang untuk mempromosikan toleransi dan kerukunan di antara warganya, hal ini selaras dengan pernyataan Pj. Wali Kota Singkawang, dalam wawancara yang dilakukan oleh Peneliti pada tanggal 4 Juli 2024. Selain itu, Pemerintah Kota Singkawang juga menunjukkan komitmen dengan menjadikan Toleransi sebagai

salah satu komponen utama dalam Visi dan Misi Kota Singkawang. Kebijakan ini didasari oleh keberagaman etnis dan agama di Singkawang yang memerlukan perhatian khusus untuk menciptakan harmoni dan kerukunan serta kesadaran bahwa toleransi adalah fondasi penting bagi kemajuan sosial dan ekonomi kota, serta memandangnya sebagai keharusan dan kebutuhan utama bagi masyarakat Singkawang.

Pemerintah Kota Singkawang telah mengambil langkah signifikan dalam aspek hukum, sosial, dan budaya untuk mempromosikan toleransi. Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022 dan Rencana Pemerintah Daerah (RPD) 2023-2026, isu toleransi menjadi bagian penting dalam Agenda Pembangunan Revolusi Mental dan Kebudayaan. Revolusi mental di sini adalah upaya mengubah cara pandang dan perilaku masyarakat menuju kemajuan dan modernitas. Selain itu, Singkawang telah mengadopsi berbagai peraturan daerah yang mendukung toleransi, termasuk Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, yang memastikan akses yang adil terhadap fasilitas umum dan layanan publik. Berdasarkan wawancara dengan Pj. Sekretaris Daerah Kota Singkawang, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Singkawang sudah berusaha menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan inklusif, di mana setiap individu, terlepas dari latar belakang agama, suku, atau budaya, merasa dihargai, dan dilindungi hak-haknya dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan tata ruang tanpa ada diskriminasi.

Implementasi peraturan ini juga merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada prinsip-prinsip toleransi dan kebersamaan. Kota Singkawang juga memiliki Peraturan Wali Kota Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Toleransi Masyarakat dan Peraturan Wali Kota Nomor 130 Tahun 2021 tentang Penanganan Konflik Sosial, yang berfungsi sebagai panduan komprehensif untuk menjaga toleransi dan mencegah konflik. Namun, kota ini belum memiliki Peraturan Daerah khusus tentang toleransi dan kerukunan umat beragama. Selanjutnya, berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah Pusat, terdapat beberapa Perangkat Daerah di Kota Singkawang yang dinilai memiliki kontribusi terhadap terwujudnya toleransi melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan yang diampu masing-masing, berturut-turut yakni:

1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di Kota Singkawang berperan signifikan dalam menciptakan toleransi melalui program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Kesbangpol memainkan peran penting dalam menjadikan Singkawang sebagai Kota Tertoleran Tahun 2023 melalui berbagai program dan kolaborasi lintas sektoral. Program unggulan Kesbangpol meliputi kegiatan berbasis APBD yang fokus pada harmonisasi kebhinekaan dan kegiatan sosial di kelurahan. Kesbangpol memastikan keberlanjutan program dengan membangun jejaring kerja yang kuat dan evaluasi rutin, melibatkan semua stakeholder untuk peningkatan efektivitas. Pendekatan kolaboratif dan komitmen pemerintah daerah menjadi kunci utama keberhasilan program-program toleransi di Singkawang.

2) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah Kota Singkawang, melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, aktif dalam program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan. Program ini bertujuan meningkatkan partisipasi perempuan dalam kehidupan publik dan ekonomi, serta melindungi hak-hak perempuan, menciptakan lingkungan yang inklusif dan toleran. Dinas ini juga bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah dan komunitas lokal untuk mendukung perempuan korban

kekerasan melalui layanan konseling, perlindungan hukum, dan pusat penampungan. Selain itu, upaya perlindungan anak juga menjadi fokus utama.

3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang

Dari wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang, terlihat jelas bahwa pendidikan dan kebudayaan memainkan peran yang sangat penting dalam upaya memperkuat toleransi dan keberagaman di kota ini. Melalui berbagai program yang diimplementasikan, seperti Gerakan Satu Sekolah Satu Kearifan Lokal, Pekan Kebudayaan Daerah, dan Pagelaran Multi Etnis, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupaya menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis. Selain itu, penguatan profil Pancasila di kalangan pelajar menjadi salah satu fokus utama untuk menanamkan nilai-nilai kebhinekaan dan toleransi sejak dini.

4) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Singkawang

Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kota Singkawang memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan toleransi melalui berbagai inisiatif yang mendorong interaksi harmonis di antara masyarakat beragam. Dengan menyelenggarakan program pendidikan toleransi, Bagian Kesra berupaya membangun kesadaran akan pentingnya saling menghormati dan memahami perbedaan. Selain itu, kolaborasi dengan LSM dan organisasi keagamaan dalam bentuk dialog antar agama, seminar, dan lokakarya, menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berbagi pandangan dan membangun hubungan yang lebih erat. Bagian Kesra juga memfasilitasi kegiatan sosial dan budaya yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat, memperkuat solidaritas dan kerjasama antar komunitas.

b. DPRD Kota Singkawang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Singkawang memainkan peran penting dalam mewakili aspirasi masyarakat dan mengawasi pemerintahan. DPRD terdiri dari anggota yang dipilih melalui pemilihan umum, mencerminkan keberagaman etnis, agama, dan budaya di Singkawang. DPRD bertanggung jawab merumuskan kebijakan dan peraturan daerah, memastikan kebijakan sejalan dengan kebutuhan masyarakat, dan menangani isu-isu spesifik melalui beberapa komisi.

Selain peran legislatif dan pengawasan, DPRD berfungsi sebagai advokat dan mediator, menghubungkan masyarakat dan pemerintah, mendengarkan aspirasi masyarakat, dan mencari solusi konflik yang adil dan damai. DPRD berkomitmen untuk menciptakan kebijakan inklusif dan memastikan program pemerintah berdampak positif bagi semua warga. Secara keseluruhan, DPRD Kota Singkawang berupaya memastikan nilai-nilai toleransi dan kerukunan terus berkembang, menjadikan keberagaman sebagai kekuatan yang menyatukan.

c. Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang

Dalam wawancara dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang, beliau menjelaskan bahwa kantor ini memiliki peran strategis dalam mempromosikan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Salah satu program utama yang dikelola oleh kantor ini adalah dialog antar agama, di mana para pemuka agama dari berbagai latar belakang berkumpul untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama atas isu-isu yang dapat mempengaruhi keharmonisan masyarakat. Selain dialog antar agama, Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang juga aktif dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan agama yang inklusif, juga berperan dalam mediasi dan penyelesaian konflik keagamaan.

d. Kepolisian Resor Kota Singkawang

Dalam wawancara dengan Wakapolres Kota Singkawang, beliau menjelaskan bahwa Polres Singkawang berkomitmen untuk mempromosikan toleransi dan kerukunan antar warga. Upaya ini dilakukan tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga

melalui pendekatan preventif dan edukatif. Polres secara aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya hidup harmonis dan menghormati perbedaan. Mereka mengadakan berbagai program seperti penyuluhan di sekolah-sekolah, dialog dengan tokoh masyarakat, dan kampanye anti-diskriminasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi.

Secara keseluruhan, Kepolisian Resor Kota Singkawang memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat. Kapolres menegaskan komitmen Polres untuk terus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tokoh agama, dan organisasi masyarakat, guna menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan toleran.

e. Komando Distrik Militer 1202/SKW

Dalam wawancara dengan Komandan Kodim 1202/SKW, beliau menjelaskan bahwa Kodim tidak hanya berfokus pada aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga pada upaya memperkuat toleransi dan kerukunan di tengah masyarakat. Salah satu inisiatif penting yang dilakukan Kodim adalah program pembinaan teritorial, di mana prajurit TNI berinteraksi langsung dengan warga melalui kegiatan sosial, seperti kerja bakti, penyuluhan, dan pendampingan dalam berbagai proyek pembangunan.

Kodim 1202/SKW juga aktif dalam mendukung kegiatan lintas agama dan budaya di Kota Singkawang. Kehadiran prajurit TNI dalam kegiatan-kegiatan ini tidak hanya menunjukkan dukungan terhadap keberagaman, tetapi juga membantu menciptakan suasana yang aman dan kondusif. Dengan demikian, TNI berperan sebagai penjaga dan pendukung harmoni sosial di Singkawang. Selain itu, Kodim 1202/SKW memiliki program pelatihan dan penyuluhan yang bertujuan meningkatkan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air di kalangan masyarakat, terutama generasi muda.

f. Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)

Dalam wawancara dengan Ketua FKUB Kota Singkawang, dijelaskan bahwa peran FKUB sangat strategis dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kerukunan dan toleransi antarumat beragama. FKUB aktif menyelenggarakan dialog lintas agama yang melibatkan tokoh agama, pemuka masyarakat, dan pemerintah. Organisasi ini juga memfasilitasi pertemuan rutin antar pemuka agama untuk membahas isu-isu terkini dan menjaga kerukunan. Kegiatan-kegiatan pendidikan seperti seminar dan lokakarya tentang toleransi dan kerukunan melibatkan pelajar dan masyarakat umum. FKUB Singkawang secara aktif memediasi konflik berbasis agama, mengedepankan dialog terbuka dan resolusi damai. Mereka berkolaborasi erat dengan aparat keamanan dan pemerintah untuk memastikan perdamaian dan keadilan. FKUB juga memberikan masukan mengenai peraturan dan kebijakan untuk memperkuat kerukunan dan mencegah diskriminasi. Mereka berpartisipasi dalam penyusunan peraturan daerah dan merekomendasikan peraturan khusus tentang toleransi dan kerukunan. FKUB Kota Singkawang memiliki komitmen tinggi untuk menciptakan lingkungan yang damai bagi semua warga, terlepas dari latar belakang agama dan etnis mereka.

g. Forum Komunikasi Pemuda Lintas Agama (FKPELA)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua FKPELA, peran dan kontribusi FKPELA dalam menjaga toleransi di Kota Singkawang sangat signifikan. FKPELA berperan sebagai jembatan komunikasi antara pemuda dari berbagai latar belakang agama, memfasilitasi dialog antar agama, dan mendorong pemuda untuk terlibat aktif dalam menjaga keharmonisan sosial. Beberapa kegiatan dari FKPELA yang dinilai memiliki kontribusi langsung terhadap toleransi adalah Deklarasi Persatuan dan Kebhinnekaan Cinta Dama, Bersih-bersih Rumah Ibadah dan Silaturahmi dengan Lembaga Keagamaan.

h. Majelis Seni Budaya Kota Singkawang

Majelis Seni Budaya (MSB) berperan penting dalam melestarikan dan mempromosikan keanekaragaman budaya di Kota Singkawang. Organisasi ini aktif mengadakan berbagai kegiatan budaya yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, dengan tujuan memperkuat toleransi dan kerukunan antar etnis dan agama. Salah satu acara tahunan yang diselenggarakan oleh MSB adalah Festival Budaya Nusantara, yang menampilkan berbagai macam kuliner dan tarian dari 17 paguyuban yang ada di Kota Singkawang. Selain itu beberapa kegiatan lain yakni Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal, Penguatan Toleransi melalui Festival Budaya, Mendorong Partisipasi Komunitas dan Edukasi serta Pengenalan Budaya.

i. Perguruan Tinggi di Kota Singkawang

Perguruan tinggi di Kota Singkawang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah, terutama melalui kolaborasi erat dengan pemerintah setempat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah memungkinkan peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan ekonomi lokal, serta penguatan kesejahteraan dan toleransi di masyarakat. Perguruan Tinggi seperti STIH (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum) Soelthan M. Tsafioeddin Singkawang, STIE (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi) Mulia Singkawang dan ISBI (Institut Sains dan Bisnis Internasional) Kota Singkawang berperan sebagai katalisator dalam proses Collaborative Governance dengan mengadakan forum dialog dan kegiatan bersama. Mereka berkontribusi dalam menyusun kebijakan berbasis konsensus yang mendukung toleransi dan keberagaman. Dengan adanya pertemuan rutin dan kolaborasi yang erat antara berbagai pemangku kepentingan, tercipta lingkungan yang kondusif untuk mencapai tujuan bersama dalam membangun Kota Singkawang sebagai Kota Tertoleran.

j. Penggiat Seni, Budaya dan Pemengaruh di Kota Singkawang

Kota Singkawang, yang dikenal sebagai Kota Tertoleran, memiliki berbagai penggiat seni budaya dan pemengaruh yang berperan penting dalam mempromosikan nilai-nilai keberagaman dan toleransi. Penggiat seni budaya ini tidak hanya melestarikan kebudayaan lokal tetapi juga menciptakan ruang untuk dialog dan interaksi antar komunitas. Dalam wawancara dengan para penggiat seni budaya, terungkap bahwa mereka semua memiliki komitmen yang kuat untuk mempromosikan nilai-nilai toleransi dan kerukunan di Kota Singkawang. Mereka menggunakan seni sebagai alat untuk menciptakan ruang dialog dan interaksi antar komunitas, membantu masyarakat untuk lebih memahami dan menghargai perbedaan yang ada.

k. Sektor Swasta

Sektor swasta memainkan peran penting dalam mendukung toleransi dan kerukunan di Kota Singkawang melalui berbagai inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR). Kontribusi sektor swasta tidak hanya terlihat dalam pembangunan infrastruktur, tetapi juga dalam mendukung kegiatan budaya dan sosial yang memperkuat kerukunan antarwarga. Beberapa kontribusi yang dilakukan oleh sektor swasta di Kota Singkawang adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan 3 Gerbang Masuk Kota Singkawang, yakni Gerbang Tama Ka' Lawang (Etnis Dayak) di arah Timur, Gerbang Cap Go Meh (Etnis Tionghoa) di arah Selatan dan Gerbang Mahligai Pesisir di sisi Utara merupakan bagian dari inisiatif CSR dari beberapa Perusahaan seperti PT. Astra Internasional, PT. Alfamart dan PT Kapal Api, yang dinilai sangat signifikan dampaknya bagi Toleransi di Kota Singkawang.
- 2) Pembangunan Taman Cahaya Madani oleh FIF Group, yang mana menjadi simbol komitmen sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua.

- 3) Proyek-proyek Infrastruktur di daerah terpencil di Kota Singkawang oleh tim social Bakmie Lon Cat
- 4) Dukungan terhadap Pembangunan Bandara Singkawang oleh delapan pengusaha lokal menyumbangkan dana CSR mencapai Rp 155 miliar untuk mendukung proyek ini.

Sektor swasta tidak hanya berperan dalam pembangunan ekonomi, tetapi juga dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih toleran dan inklusif. Secara keseluruhan, kontribusi sektor swasta melalui program-program CSR ini sangat penting dalam mendukung upaya pemerintah dan masyarakat Singkawang untuk mempertahankan status kota sebagai Kota Tertoleran. Inisiatif-inisiatif tersebut menunjukkan bahwa kerjasama antara sektor publik dan swasta dapat menghasilkan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan sosial dan budaya yang inklusif dan berkelanjutan.

l. Media Lokal Kota Singkawang

Media memiliki peran yang krusial dalam membangun dan memelihara toleransi di Kota Singkawang. Berbagai platform media, baik lokal maupun nasional, secara aktif berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang mendukung kerukunan dan toleransi antarumat beragama dan etnis di kota ini. Media lokal di Singkawang, termasuk radio, televisi, surat kabar, dan platform digital, rutin menyiarkan program yang mempromosikan toleransi dan kerukunan melalui berita, talk show, dan dokumenter yang mendidik masyarakat tentang pentingnya menghormati perbedaan. Mereka berkolaborasi dengan pemerintah dan lembaga non-pemerintah untuk kampanye publik yang meningkatkan kesadaran tentang toleransi dan inklusi, serta menyoroti kebijakan dan inisiatif terkait.

m. Masyarakat Sipil di Kota Singkawang

Peran masyarakat sipil dalam mewujudkan toleransi di Kota Singkawang sangatlah penting. Masyarakat memiliki kemampuan untuk membangun jembatan komunikasi antar berbagai kelompok etnis dan agama, serta mempromosikan nilai-nilai toleransi dan kerukunan melalui berbagai kegiatan sehari-hari. Masyarakat sipil di Kota Singkawang aktif dalam menginisiasi berbagai kegiatan komunitas yang bertujuan untuk memperkuat kerukunan dan toleransi. Kegiatan seperti kerja bakti, pasar murah, dan kegiatan olahraga bersama menjadi sarana bagi warga untuk saling berinteraksi dan membangun hubungan yang harmonis antar kelompok etnis dan agama. Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan keagamaan dan budaya yang diadakan oleh berbagai komunitas etnis di Singkawang juga menjadi faktor penting dalam memperkuat toleransi. Warga sering berpartisipasi dalam perayaan Imlek, Idul Fitri, Natal, dan Cap Go Meh, yang merupakan momen untuk saling mengenal dan menghargai kebudayaan serta tradisi satu sama lain.

2. Proses *Collaborative Governance* dalam Mewujudkan Kota Tertoleran Forum Tahun 2023

Apabila mengacu pada kerangka Ansell & Gash (2007) terdapat lima indikator yang digunakan untuk melaksanakan proses *Collaborative Governance*. Berikut ini adalah analisis proses *Collaborative Governance* terhadap para aktor yang terlibat dalam mewujudkan Singkawang sebagai Kota Tertoleran Tahun 2023, menggunakan indikator tersebut:

a. Dialog Tatap Muka (*Face-to-Face Dialog*)

Dalam proses *Collaborative Governance* harus terdapat dialog tatap muka (*face-to-face dialog*). Semua proses kolaboratif dalam *Collaborative Governance* dibangun pada dialog langsung antara pemangku kepentingan. Komunikasi langsung ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi peluang saling menguntungkan dan memecah stereotip serta hambatan komunikasi. Beberapa *face-to-*

face dialog yang terjadi dalam upaya mewujudkan Kota Singkawang sebagai Kota Tertoleran Tahun 2023:

1) Dialog publik dalam rangka Peringatan Hari Persaudaraan Internasional

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Persaudaraan Internasional yang dilakukan pada setiap tanggal 4 Februari, dan pada Tahun 2023 tema yang diusung adalah Persaudaraan dan Toleransi menjadi Modal Dasar Kerjasama yang baik membangun Kota Singkawang.

2) Dialog Publik dalam Festival Hak Asasi Manusia

Pada Bulan Oktober 2023, Kota Singkawang mendapat kesempatan untuk menyelenggarakan Festival Hak Asasi Manusia yang mengangkat tema Bersatu Menjaga Martabat Manusia Indonesia yang Adil, Toleran, dan Inklusif. Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari ini menghadirkan 4 diskusi pleno dan 9 diskusi paralel, dialog orang muda, kunjungan ke sejumlah tempat yang memiliki makna penting terkait HAM, deklarasi Festival HAM, kampanye toleransi, sosialisasi anti-bullying, pertunjukan seni, hingga pameran produk dan kuliner lokal yang diikuti seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan toleransi di Kota Singkawang, termasuk di dalamnya, perguruan tinggi, media, sektor swasta, penggiat ekonomi kreatif dan Masyarakat sipil. Pemerintah Kota Singkawang merupakan fasilitator utama dalam kegiatan ini dengan bekerja sama dengan Komnas HAM, INFID dan Kantor Staf Presiden (KSP).

3) Silaturahmi Kebangsaan

Pada tanggal 13 Desember 2023, telah dilaksanakan juga Silaturahmi Kebangsaan yang mengusung tema Memelihara Keharmonisan Kota Singkawang Menuju Pemilu Damai 2024, sebagai salah satu bentuk dialog tatap muka yang dilakukan dalam rangka mewujudkan Kota Singkawang sebagai Kota Tertoleran Tahun 2023.

4) Dialog Kerukunan antar Umat Beragama

Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang pada tahun 2023, juga memfasilitasi dialog tatap muka terkait Kerukunan Umat Beragama yang dirangkaikan dengan Launching Kampung Moderasi Beragama di Kelurahan Nyarumkop Kecamatan Singkawang Timur. Kegiatan ini mengusung dan membahas upaya menciptakan suasana masyarakat yang rukun dan harmonis antar masyarakat beragama di lapisan Masyarakat hingga tingkat Kelurahan.

5) Rapat Rutin Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Singkawang

Dialog rutin yang membahas isu toleransi di Kota Singkawang adalah Rapat Forum Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Singkawang bekerjasama dengan Pengurus FKUB Kota Singkawang. Forum ini membahas tentang bagaimana untuk memperkuat toleransi dan mempertahankan kedamaian yang ada di Kota Singkawang. Beberapa kegiatan pertemuan/dialog tersebut di atas menunjukkan bahwa Kota Singkawang pada Tahun 2023, telah memenuhi indikator pertama dari kerangka kerja *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2007), yakni Face-to-face dialog yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi peluang saling menguntungkan dan memecah stereotip serta hambatan komunikasi dalam konteks mewujudkan toleransi.

Dari 13 kelompok stakeholder kontributor toleransi yang ditemukan oleh Penulis, keseluruhannya pernah ikut dalam dialog tatap muka, namun dengan intensitas yang berbeda. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapat bahwa sejumlah stakeholder di Kota Singkawang terlibat secara konsisten dalam berbagai kegiatan dialog yang diadakan. Pemerintah Kota Singkawang menunjukkan keterlibatan yang aktif dengan berpartisipasi dalam semua kegiatan yang tercantum, seperti Dialog Hari Persaudaraan Internasional, Dialog publik dalam Festival HAM 2023, Silaturahmi

Kebangsaan, Dialog Kerukunan Umat Beragama, dan Dialog Rutin Forum Kerukunan Umat Beragama. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi dan kerukunan di masyarakat. Kelompok lain seperti DPRD Kota Singkawang, Polres Singkawang, Kodim 1202/Singkawang, dan Kantor Kemenag Kota Singkawang juga menunjukkan partisipasi yang cukup tinggi, meskipun tidak sepenuhnya konsisten dalam semua kegiatan. Kehadiran mereka, terutama dalam dialog seperti Dialog Hari Persaudaraan Internasional dan Festival HAM 2023, penting untuk memberikan dukungan kelembagaan terhadap upaya kerukunan dan toleransi.

Selain itu, FKUB Singkawang dan FKPELA Singkawang secara rutin terlibat dalam dialog-dialog yang terkait langsung dengan kerukunan umat beragama, menunjukkan peran kunci mereka dalam mempromosikan harmoni antaragama di Singkawang. Perguruan Tinggi di Kota Singkawang dan Majelis Seni Budaya di Kota Singkawang terlibat dalam kegiatan yang lebih berfokus pada edukasi dan promosi budaya, terutama melalui dialog publik dan festival. Penggiat Industri Kreatif, Sektor Swasta, dan Media tampaknya lebih jarang terlibat dalam dialog tatap muka, namun lebih terlihat perannya dalam acara-acara yang melibatkan keterlibatan publik yang lebih luas seperti Festival HAM 2023 dan Silaturahmi Kebangsaan. Masyarakat Sipil menunjukkan kehadiran yang cukup konsisten di berbagai dialog, menandakan peran penting mereka sebagai peserta aktif yang mendukung nilai-nilai toleransi dan kerukunan di masyarakat. Secara keseluruhan, keterlibatan stakeholder dapat dibilang belum cukup merata dalam mempromosikan dialog dan kerukunan di Kota Singkawang.

Masih terdapat ruang untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta dan media dalam dialog tatap muka untuk memperkuat sinergi antara berbagai pihak dalam mewujudkan kota yang lebih toleran dan harmonis. Tidak meratanya kehadiran dalam dialog tatap muka terkait upaya mewujudkan toleransi di Kota Singkawang dapat menghambat jalannya komunikasi dan merupakan hal yang harus disempurnakan oleh Kota ini agar hasil yang ingin dicapai dapat lebih maksimal. Komunikasi ini penting, karena tidak hanya sebagai medium negosiasi, tetapi juga sebagai inti dari proses membangun hubungan yang kuat, memperkuat saling pengertian, dan menciptakan lingkungan yang mendukung kerjasama dan konsensus dalam pengambilan Keputusan, sehingga segala sumber daya, peran dan kontribusi dari para stakeholder menjadi lebih terarah dan berkesinambungan antar satu sama lain.

b. Pembangunan Kepercayaan (*Trust Building*)

Dalam konteks *Collaborative Governance* Ansell & Gash (2007), *trust building* atau pembangunan kepercayaan antara pemangku kepentingan merupakan salah satu aspek kunci yang sering ditemukan dalam literatur. Pembangunan kepercayaan di antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses kolaboratif dianggap penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, memperkuat hubungan antar pemangku kepentingan, dan meningkatkan efektivitas kolaborasi. Pemerintah Kota Singkawang sebagai stakeholder kunci dalam upaya mewujudkan Kota Singkawang sebagai Kota Tertoleran Tahun 2023, telah berhasil membangun hubungan saling percaya dengan stakeholder melalui transparansi dan akuntabilitas, serta konsistensi dalam pelaksanaan program-program toleransi dan fasilitasi terhadap stakeholder lainnya. Selain itu, pemerintah Kota Singkawang juga selalu hadir dalam berbagai kegiatan keagamaan dan kebudayaan yang dihadirkan oleh masing-masing elemen ataupun kelompok di Kota Singkawang.

Kehadiran tersebut juga diperkuat dengan pernyataan-pernyataan publik dari jajaran Pemerintah Kota Singkawang yang tidak pernah berpihak, menyudutkan dan membedakan satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pj. Wali Kota Singkawang, dalam wawancara pada tanggal 27 Juni 2024, yang

menyatakan bahwa Pemerintah Kota Singkawang sebagai stakeholder kunci dalam mewujudkan Kota Tertoleran Tahun 2023 telah berhasil membangun kepercayaan dengan stakeholder melalui transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi program toleransi. Kami selalu hadir dalam berbagai kegiatan keagamaan dan budaya, serta memberikan pernyataan publik yang netral dan inklusif. Tindakan ini menjadi contoh bagi stakeholder lain untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan bersama. Selain itu, Pembangunan kepercayaan di Kota Singkawang ditunjukkan dengan banyaknya rumah ibadah yang dibangun secara berdampingan tanpa ada keberatan antar satu sama lain, misalnya dua tempat ibadah terkemuka Vihara Tri Dharma Budi Raya yang mewakili komunitas Tionghoa dan Masjid Raya Singkawang untuk umat Islam.

Selain itu, terdapat juga Gereja Katolik Santo Fransiskus Assisi Paroki Singkawang yang terletak di tengah kota Singkawang tidak jauh dari masjid terbesar di Singkawang yakni, Masjid Agung Kota Singkawang. Selanjutnya, terdapat juga GSRI Kota Singkawang yang berada tepat di sebelah Kelenteng Fu Tet Chi di Jalan Kalimantan, Kota Singkawang. Bukti-bukti ini menggambarkan dedikasi Singkawang untuk melestarikan keragaman agama dan saling menghormati. Koeksistensi unik ini menampilkan warisan toleransi kota yang abadi, menginspirasi persatuan dan pengertian. Contoh lain dari pembangunan kepercayaan adalah dengan dibangunnya simbol-simbol yang mengekspresikan toleransi dan kerukunan masyarakat seperti Gong Perdamaian, Tugu Toleransi, Tugu 3 Etnis 1001 AI, Gerbang Masuk Kota Singkawang yang mewakili 3 etnis terbesar, yakni Gerbang Tama Ka' Lawang untuk etnis Dayak, Gerbang Cap Go Meh untuk etnis Tionghoa dan Gerbang Mahligai Pesisir untuk Etnis Melayu. Pembangunan kepercayaan juga dapat direfleksikan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan Bersama yang menunjukkan komitmen untuk mencapai tujuan mewujudkan toleransi.

Salah satu contoh konkrit yang terjadi adalah terlaksananya festival budaya Nusantara, yang merupakan buah Kerjasama dari Pemerintah Kota Singkawang dengan Majelis Seni Budaya (MSB) Kota Singkawang menggelar Pekan Kebudayaan Daerah dan Festival Budaya Nusantara. Bentuk lain adalah perayaan hari-hari besar setiap agama yang ada di Kota Singkawang serta perayaan adat yang tidak pernah dipersekusi ataupun didiskriminasi oleh suatu kelompok tertentu dan justru mendapatkan dukungan antar satu sama lain. Setiap kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk merayakan hari besar mereka di Kota Singkawang melalui pemasangan simbol-simbol agama dan budaya di setiap sudut kota, dan hal tidak pernah terjadi pengerusakan ataupun penolakan terhadap Tindakan tersebut.

c. Komitmen Terhadap Proses (*Commitment to the Process*)

Tingkat komitmen pemangku kepentingan terhadap kolaborasi dianggap sebagai variabel kritis dalam menjelaskan keberhasilan atau kegagalan kolaborasi. Salah satu contoh pembentukan Komitmen yang kuat dalam proses *Collaborative Governance* untuk mewujudkan Kota Singkawang sebagai Kota Tertoleran Tahun 2023 adalah ketika semua stakeholder tanpa terkecuali berhasil menunjukkan keterlibatan mereka masing-masing dalam bentuk pengalokasian sumber daya, waktu dan energi yang signifikan untuk mendukung program-program toleransi. Di Kota Singkawang, berbagai program dan kegiatan telah diinisiasi untuk mendukung toleransi dan kerukunan antarwarga. Pemerintah Kota Singkawang melalui berbagai instansi seperti Bagian Kesejahteraan Rakyat, Badan Kesbangpolinmas, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta bekerja sama dengan DPRD, Polres, Kodim 1202/Singkawang, Kantor Kemenag, FKUB, FKPELA, dan Majelis Seni Budaya, telah menyelenggarakan acara seperti Dialog Hari Persaudaraan Internasional, Festival HAM 2023, Silaturahmi Kebangsaan, dan Dialog Kerukunan Umat Beragama.

Selain itu, FKUB secara rutin mengadakan dialog untuk mempromosikan kerukunan umat beragama, sedangkan Majelis Seni Budaya aktif dalam Festival Budaya Nusantara dan Pekan Kebudayaan Daerah. Program lain seperti Bersih-Bersih Rumah Ibadah oleh FKPELA dan Penghiasan Kota saat Hari Besar Keagamaan yang melibatkan sektor swasta juga berperan dalam memperkuat toleransi. Tidak ketinggalan, masing-masing perkumpulan etnis (paguyuban) mengadakan festival adat dan budaya, sementara Pemerintah Kota dan sektor swasta terlibat dalam pembangunan simbol-simbol dan infrastruktur yang mendukung toleransi. Upaya legislatif pun dilakukan melalui penyusunan naskah akademik Perda terkait toleransi, serta seminar moderasi beragama oleh Kantor Kemenag Kota Singkawang. Program Tasyakuran Kota Tertoleran menandai apresiasi terhadap upaya toleransi, sedangkan Polres Singkawang memimpin mediasi konflik sosial berbasis perbedaan. Kodim 1202/Singkawang melalui pembinaan teritorial prajurit TNI juga turut berinteraksi dengan masyarakat untuk membina toleransi. Perguruan tinggi di kota ini menyumbangkan pemikiran akademik dalam kebijakan toleransi, dan penggiat industri kreatif serta media lokal aktif mempromosikan nilai-nilai keberagaman dan kerukunan melalui karya kreatif dan penyebaran informasi. Seluruh inisiatif ini menggambarkan sinergi antara pemerintah, lembaga legislatif, penegak hukum, masyarakat, dan sektor swasta dalam mewujudkan Singkawang sebagai kota yang toleran dan harmonis.

d. Pemahaman Bersama (*Shared Understanding*)

Pemahaman bersama dianggap sebagai langkah penting dalam proses kolaboratif, di mana pemangku kepentingan perlu mengembangkan kesepahaman tentang apa yang dapat mereka capai secara bersama-sama. Hal ini melibatkan kesepakatan mengenai misi bersama, tujuan bersama, visi bersama, atau nilai inti yang ingin dicapai. Pemahaman bersama juga dapat mencakup kesepakatan mengenai definisi masalah yang dihadapi dan pengetahuan yang relevan untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan memiliki pemahaman bersama yang kuat, pemangku kepentingan dapat bekerja secara lebih efektif dalam mencapai tujuan kolaboratif mereka.

Dalam membentuk pemahaman bersama mengenai toleransi di Kota Singkawang, Kota Singkawang sudah dan sedang berusaha untuk melahirkan sebuah produk hukum berupa Peraturan Daerah yang mengatur tentang bagaimana kehidupan toleransi dan kerukunan umat beragama dijalankan. Walaupun stakeholder di Kota Singkawang sudah menunjukkan minat yang sama terhadap isu toleransi, namun ternyata belum mampu menghasilkan satu kesepakatan terhadap nilai-nilai toleransi yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ketua DPRD Kota Singkawang, dalam wawancara pada tanggal 9 Mei 2024.

Hadirnya Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Toleransi Masyarakat serta Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 130 Tahun 2021 tentang Penanganan Konflik Sosial ternyata belum cukup, karena hanya berfokus pada lembaga pemerintahan dan lembaga yang bersumber dari masyarakat, sedangkan untuk sektor swasta dan media belum sepenuhnya diatur secara spesifik. Diharapkan nantinya dengan adanya regulasi ini tentu yang diharapkan adalah bisa memelihara, mengembangkan rasa aman, harmonis serta memiliki tingkat toleransi yang tinggi, sistematis dan lebih terarah di Kota Singkawang.

e. Hasil Sementara (*Intermediate Outcomes*)

Umpan balik dan pembelajaran dari hasil sementara sering kali dianggap sebagai langkah kritis dalam membangun momentum yang dapat mengarah pada keberhasilan kolaborasi. Hasil-hasil perantara ini dapat berupa *small wins* atau kemenangan kecil yang memberikan dorongan positif dan memperkuat kepercayaan antar pemangku kepentingan. *Intermediate outcomes* juga dapat berperan dalam proses pembelajaran

kolaboratif. Salah satu yang dilakukan di Kota Singkawang adalah Tasyakuran Kota Tertoleran Tahun 2023, yang dilakukan sebagai bentuk upaya Syukur dan apresiasi terhadap seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya, dimulai dari institusi Pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, FKUB, FKPELA dan termasuk media, perguruan tinggi, penggiat industri kreatif, sektor swasta, hingga Masyarakat sipil di Kota Singkawang.

Hal ini menunjukkan bahwa Kota Singkawang telah mampu mengidentifikasi dan merayakan pencapaian sementara selama proses *Collaborative Governance*. Ini bisa menjadi peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya toleransi, penurunan insiden intoleransi, atau pelaksanaan program-program inklusif. Selain itu, mengukur dan mengevaluasi hasil-hasil sementara ini penting untuk menjaga momentum dan menunjukkan kemajuan kepada semua pemangku kepentingan. Meskipun sudah melakukan pembelajaran hasil sementara dalam bentuk tasyakuran, Kota Singkawang belum melakukan evaluasi internal secara komprehensif terkait pelaksanaan *Collaborative Governance*. Semestinya, perlu dilakukan penyusunan laporan berkala yang mengidentifikasi pencapaian sementara, seperti peningkatan partisipasi masyarakat dalam program toleransi, dan tidak mengandalkan laporan evaluasi dari pihak eksternal saja seperti dari SETARA Institute. Selain itu, perlu juga dilakukan pemberian penghargaan dan apresiasi ataupun pengakuan terhadap stakeholder yang cenderung unggul dalam mendukung toleransi di Kota Singkawang, sehingga dapat memberikan semangat bagi stakeholder lain untuk terus berperan dan berkontribusi.

Kesimpulan

Berdasarkan, analisis yang dilakukan, terdapat 2 simpulan utama dapat diambil, Pertama terdapat 13 pemangku kepentingan utama yang terlibat dalam mewujudkan Singkawang sebagai Kota Tertoleran Tahun 2023, dengan berbagai peran dan kontribusinya masing-masing, yaitu (1) Pemerintah Kota Singkawang, memainkan peran kunci dalam mengatur dan memfasilitasi kerjasama antara berbagai stakeholder. Melalui kebijakan yang inklusif dan berorientasi pada toleransi, seperti Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Toleransi Masyarakat dan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 130 Tentang Penanganan Konflik Sosial, serta inisiatif lainnya, pemerintah kota berhasil menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kerukunan antarumat beragama (2) DPRD Kota Singkawang, turut berperan aktif dalam merumuskan dan mengesahkan peraturan yang mendukung upaya toleransi. DPRD bekerja sama dengan pemerintah kota untuk mendorong pengesahan peraturan yang mendukung kerukunan dan toleransi, meskipun masih diperlukan kajian mendalam untuk beberapa peraturan terkait, (3) Kantor Kemenag Kota Singkawang, memiliki kontribusi signifikan dalam memberikan edukasi dan pembinaan keagamaan yang moderat, serta memfasilitasi dialog antarumat beragama. Ini membantu menurunkan potensi konflik berbasis agama dan memperkuat toleransi di kalangan Masyarakat, (4) Kepolisian Resor Singkawang dan (5) Kodim 1202/SKW, sebagai aparat keamanan memainkan peran vital dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya berbagai kegiatan lintas agama dan budaya.

Kepolisian dan TNI bekerja sama untuk memastikan setiap kegiatan berjalan aman dan tertib, serta siap bertindak cepat jika terjadi insiden yang mengancam kerukunan, (6) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan (7) Forum Komunikasi Pemuda Lintas Agama (FKPELA) aktif dalam mengadakan dialog, seminar, dan kegiatan bersama yang mempromosikan toleransi. Peran mereka dalam memfasilitasi komunikasi dan pengertian antarumat beragama sangat penting dalam membangun dan memelihara kerukunan, (8) Perguruan Tinggi di Kota Singkawang yang menyumbangkan pemikiran,

publikasi serta penelitian tentang Toleransi di Kota Singkawang (9) Majelis Seni Budaya dan (10) Penggiat Industri Kreatif seperti Seni, Budaya, dan Pemengaruh yang berkontribusi melalui pelestarian dan promosi budaya lokal. Pagelaran seni dan budaya multi etnis menjadi sarana efektif untuk mempererat hubungan antar etnis dan mempromosikan keragaman sebagai aset kota, (11) Sektor Swasta, Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam program CSR, seperti FIF Group dan para pengusaha lokal yang mendanai pembangunan infrastruktur, berperan dalam menciptakan ruang publik yang inklusif dan mendukung toleransi.

Pembangunan Taman Cahaya Madani dan Gerbang Cap Go Meh adalah contoh nyata kontribusi sektor swasta dalam upaya ini dan (12) Media massa dan media sosial memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi dan cerita positif tentang kerukunan dan toleransi di Singkawang. Media membantu membentuk opini publik yang mendukung upaya kolaboratif dan menginspirasi partisipasi lebih lanjut dari masyarakat luas, (13) Masyarakat sipil yang berpartisipasi aktif dalam forum-forum dialog dan diskusi tentang toleransi. Akan tetapi, peran dan kontribusi antar Stakeholder tersebut masih belum diintegrasikan dan disusun secara terstruktur dan sistematis dalam sebuah peraturan Daerah. Kedua, dengan menggunakan kerangka kerja proses *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007), perwujudan Kota Toleran Tahun 2023 di Kota Singkawang dinilai telah menunjukkan rangkaian proses *Collaborative Governance* yang dimulai dari Dialog Tatap Muka (*Face-to-Face Dialog*), Pembangunan Kepercayaan (*Trust Building*), Komitmen yang Kuat (*Strong Commitment*), Pemahaman Bersama (*Shared Understanding*) dan Pembelajaran terhadap Hasil Sementara (*Intermediate Outcomes*). Akan tetapi penulis menilai *Collaborative Governance* dalam mewujudkan Kota Singkawang sebagai Kota Tertoleran Tahun 2023 memiliki kekurangan khususnya dalam setiap aspek, misalnya belum meratanya partisipasi dalam dialog tatap muka (*Face-to-Face Dialog*), dan belum paripurnanya Pemahaman Bersama (*Shared Understanding*), karena belum terdapat Peraturan Daerah yang dapat menjadi Pedoman dan Cerminan konsensus terhadap kehidupan toleransi dan kerukunan umat beragama di Kota Singkawang. Selanjutnya, terhadap hasil sementara (*Intermediate Outcomes*), Kota Singkawang juga belum memiliki mekanisme akuntabilitas evaluasi internal secara komprehensif dan berkala terhadap proses *Collaborative Governance* yang telah dilaksanakan Hal ini menjadi tantangan dalam menyelaraskan kepentingan dan komitmen jangka panjang dari semua pihak terlibat.

Daftar Pustaka

- Acep, V. D. A., Murtini, E., & Santoso, G. (2023). Menghargai Perbedaan: Membangun Masyarakat Multikultural. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(2), 425–432.
- Akoleowo, V. O. O. (2021). Tolerance, Multiculturalism and the Search for National Unity. *Karl Popper and Africa: Knowledge, Politics and Development*, 83-96.
- Allport, G. W., Clark, K., & Pettigrew, T. (1954). *The Nature Of Prejudice*. Addison-Wesley.
- Amaranggana, L. P., & Afifah, M. N. (2024). 10 Daftar Kota Paling Toleran dan Intoleran di Indonesia 2023 Versi Setara Institute. Retrieved from Kompas.com website: <https://www.kompas.com/tren/read/2024/01/31/083000065/10-daftar-kota-paling-toleran-dan-intoleran-di-indonesia-2023-versi-setara>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance In Theory And Practice. *Journal Of Public Administration Research And Theory*, 18(4), 543-571.
- Chumairah, S. M., & Al-Hamdi, R. (2019). Dinamika Toleransi Di Kota Besar Indonesia: Peran Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Mewujudkan City of Tolerance. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 9(2), 175–183.

- Cipta, H., & Arief, T. M. V. (2020). Duduk Perkara Pelajar Didenda karena Nonton Cap Go Meh di Singkawang. Retrieved from Kompas.com website: <https://amp.kompas.com/regional/>
- Gibson, J. L. (1992). The Political Consequences Of Intolerance: Cultural Conformity And Political Freedom. *American Political Science Review*, 86(2), 338–356.
- Hermawati, R., Paskarina, C., & Runiawati, N. (2016). Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung. *Umbara: Indonesian Journal of Anthropology*, 1(2), 105–124.
- Hewstone, M., Rubin, M., & Willis, H. (2002). Intergroup Bias. *Annual Review of Psychology*, 53(1), 575–604.
- Jufanda, Y. (2021). *Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Toleransi Keberagaman Di Kabupaten Aceh Singkil* (Doctoral Dissertation, UIN AR-RANIRY).
- Khansa, S. N. (2023). Membangun Toleransi Beragama di Indonesia: Solusi untuk Mengatasi Intoleransi.
- Kompas. (2010). Patung Naga Jangan Dipersoalkan. Retrieved from Kompas.com website: <https://nasional.kompas.com/read/2010/07/31/06355175/OaCakrawala>
- McKinnon, C. (2007). *Toleration: A Critical Introduction*. London and New York: Routledge.
- Nuryani, T., & Taufiq, A. (2019). Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Memelihara Toleransi Beragama Kota Salatiga Tahun 2018. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(03), 381–390.
- Pettigrew, T. F., & Tropp, L. R. (2008). How Does Intergroup Contact Reduce Prejudice? Meta-Analytic Tests Of Three Mediators. *European Journal of Social Psychology*, 38(6), 922–934.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse And Revival Of American Community*. Simon And Schuster.
- Smith, S. (2011). *Equality And Diversity: Value Incommensurability And The Politics Of Recognition*. Policy Press.
- Stürmer, S., & Simon, B. (2004). The Role Of Collective Identification In Social Movement Participation: A Panel Study In The Context Of The German Gay Movement. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 30(3), 263–277.
- Suharto, H. S., & MSi, M. M. (2019). *Kebijakan Pemerintah Sebagai Manifestasi Peningkatan Toleransi Umat Beragama Guna Mewujudkan Stabilitas Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional*. Reativ.